



PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2022 BERHASIL DISEPAKATI

Konsistensi Perencanaan Anggaran Sangat Dibutuhkan

YOGYA (KR) - Konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pemkot Yogya dinilai sangat dibutuhkan. Hal ini karena berkaitan dengan optimalisasi capaian target pembangunan. Semakin lebar jarak antara perencanaan dengan realisasi menunjukkan bahwa pembangunan tidak terlaksana secara maksimal.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta yang juga Ketua Badan Anggaran H Danang Rudiyatmoko, mengaku pihaknya memberikan perhatian terhadap pertanggungjawaban APBD Kota Yogya 2022 yang baru saja disepakati bersama antara dewan dengan eksekutif.

"Kami tentu memberikan apresiasi karena laporan APBD Kota Yogya 2022 berhasil mendapatkan WTP 14 kali berturut-turut dari BPK pada 6 Maret 2023 lalu. Tapi perlu dicermati juga karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) ternyata masih cukup tinggi," bebernya.

Silpa dari APBD 2022 lalu hasil audit yang berhasil ditetapkan mencapai Rp 301,4 miliar. Masih tingginya angka Silpa tersebut menandakan antara perencanaan dengan realisasi masih belum sepadan. Seharusnya, realisasi serapan anggaran

H Danang Rudiyatmoko
Ketua DPRD



KR-Ardhi Wahdan

kegiatan dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat dalam proses recovery pasca pandemi.

Besaran Silpa itu, imbuh Danang, akan menjadi dasar dalam pembahasan APBD perubahan tahun ini. Padahal masa efektif realisasi APBD perubahan hanya menyisakan waktu tidak lebih dari tiga bulan sebelum tutup buku. Akibatnya untuk merealisasikan anggaran yang cukup besar dengan waktu yang terbatas, kerap dipilih pos pengeluaran belanja modal. Padahal belanja tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang masih membutuhkan recovery. "Kami sangat mendorong supaya real-

isasi belanja daerah itu dimaksimalkan dan diarahkan pada belanja urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat," urainya.

Oleh karena itu dirinya akan memaksimalkan fungsi Badan Anggaran ketika melakukan pembahasan perubahan APBD 2023 maupun pembahasan APBD 2024. Selain harus mengakomodir hajat Pemilu 2024 serta pemilihan kepala daerah, kegiatan yang direncanakan harus mampu realistis dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005